

**MODEL REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF PARTAI
GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014**

**MODEL RECRUITMENT OF PROSPECTIVE MEMBERS OF THE LEGISLATIVE
PARTY GROUP OF WORKS OF BANDUNG REGENCY IN THE 2014 GENERAL
ELECTION**

Budi Kurniadi

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pascasarjana Universitas Langlangbuana
kurnia170765@gmail.com

ABSTRAK

Seleksi calon anggota parlemen yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan kompetensi ditetapkan melalui kebijakan partai politik. Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung masih dihadapkan pada masalah krusial yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kebesaran partai. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan secara mendalam model rekrutmen politik. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menemukan makna berdasarkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model rekrutmen calon anggota legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung bersifat campuran antara terbuka dan tertutup yang masih diwarnai dominasi kepentingan politik terutama dalam penempatan nomor urut. Secara umum proses rekrutmen merujuk pada kebijakan partai walaupun aspek subjektif masih tampak pada calon yang memiliki potensi yang berasal diluar kader, begitu pula tim seleksi yang dinilai tidak independen karena bagian dari orang-orang yang mencalonkan diri yang menutup peluang kader partai. Sikap ini dianggap sikap yang diskriminatif yang dapat mempengaruhi soliditas dan eksistensi partai politik untum memperoleh calon dari kader yang terbaik.

Kata kunci: rekrutmen politik, anggota legislatif, pemilihan umum

ABSTRACT

Selection of candidates for parliamentarians who have the ability, knowledge and competence are determined through political party policy. The Regional Leadership Council of the Bandung-based Golongan Karya Party is still faced with a crucial problem that can affect the existence and greatness of the party. The purpose of this study is to describe deeply the political recruitment model. The recruitment model of the legislative candidate for the Regional Leadership Council of the Group of Work in Bandung Regency is a mixture of open and closed which is still colored by the dominance of political interests, especially in the placement of serial numbers. In general, the recruitment process refers to party policy, although the subjective aspect is still visible in candidates who have potential from outside the cadre, and the selection team is considered to be not independent because it is part of the nominating people who close the opportunity for party cadres. This attitude is considered a discriminatory attitude that can affect the solidity and existence of political parties to get candidates from the best cadres.

Keywords: *political recruitment, legislative members, general elections*

1. Pendahuluan

Kompetisi partai politik pada menjelang pesta demokrasi merupakan satu keniscayaan ditandai dengan dinamika penguatan internal setiap partai politik kontestan pemilihan umum yang lolos elektoral melalui implementasi visi dan misinya yang terfokus pada perhatian dan pengalihan orientasi dukungan politik. Kinerja infra struktur partai politik pada tahap ini kembali diuji untuk meraih dukungan konstituen yang selalu berubah pada tiap masa pemilihan umum merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga strategi marketing partai politikpun selalu dievaluasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang optimal. Desain politik modern partai politik berfungsi meninjau dan mengkaji kepentingan konstituen dalam pengambilan kebijakan strategis dan partai politik menjadi alat perjuangan rakyat yang efektif melalui proses politik yang sah.

Aktivitas partai politik yang tampak memanas dan penuh persaingan menjelang pemilihan umum rekrutmen calon anggota legislatif merupakan kewenangan pimpinan infrastruktur politik baik pada tingkat pusat maupun daerah dengan merujuk pada prosedur dan mekanisme yang berlaku pada internal partai. Tahapan ini merupakan tahap yang sangat menentukan terhadap eksistensi partai politik lima tahun kedepan. Apabila dicermati rekrutmen politik merupakan proses seleksi komponen bangsa yang memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan wawasan politik untuk memperjuangkan kepentingan partai dan merespons aspirasi yang diperjuangkan di parlemen atau badan legislatif.

Setiap partai politik memiliki cara dan strategi tertentu untuk menjaring calon anggota legislatif yang berkualitas, walaupun secara umum pelaksanaan rekrutmen ini dilakukan secara terbuka maupun tertutup sejalan dengan kebijakan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: KEP-227/DPP/GOLKAR/I/2013 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota¹.

Realitas politik rekrutmen berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan kader partai, khususnya di Kabupaten Bandung masih ditemukan pelanggaran kriteria yang ditetapkan dan ditunjukkan dengan :

- 1). Kompetensi calon anggota legislatif belum menjadi perhatian serius, sehingga banyak ditemukan pada Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) calon yang memiliki keilmuan dan pengalaman memadai.
- 2). Lama pengabdian pada partai belum dipatuhi yaitu minimal 5 tahun bagi Calon anggota DPRD dan 10 tahun bagi calon anggota DPR RI.
- 3). Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT) belum sepenuhnya menjadi acuan seleksi dan indikator penilaiannya tidak tegas begitupula calon yang masih bermasalah hukum dan tidak melepaskan jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Masalah ini menjadi sangat menarik untuk dikaji untuk mendeskripsikan dan mengungkap model rekrutmen, sehingga tujuan partai politik dapat efektif sejalan dengan legalitas partai untuk mewujudkan eksistensi dalam kompetisi politik demokrasi.

2. Landasan Teoritis

Dinamika politik demokrasi melahirkan strategi politik yang bervariasi pada setiap kontestan politik baik pada tahap persiapan, pelaksanaan dan *output* pemilihan umum. Rekrutmen dan seleksi

¹ *Politika, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013*

kandidat anggota parlemen merupakan tonggak bagi partai politik untuk memperkokoh eksistensi dan kompetisi politik pada lembaga legislatif, sehingga tahapan yang sarat dengan muatan kepentingan ini akan menjadi penentu dan indikator kepercayaan publik terhadap partai.

Perhatian publik, kader partai maupun non kader untuk turut berpartisipasi politik di parlemen melalui pemilihan umum tidak pernah surut karena cara inilah yang konstitusional untuk memperoleh jabatan politik melalui partai politik. Menurut Hutington dan Nelson dalam syafei (2002 :132) bahwa: “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah”.² Partai politik merupakan salah satu syarat negara demokratis, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa partai politik maka tidak ada demokrasi. Pada posisi strategis ini partai politik memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi.

Inti rekrutmen politik pada dasarnya adalah seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sejumlah peranan dalam merumuskan, mempengaruhi dan mengontrol keputusan politik pada sistem politik. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mamu melaksanakan peranannya maka keberlangsungan sistem

politik akan terancam. Surbakti (2010: 150 – 151).³

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini sangat tergantung terhadap informasi dari objek/partisipan pada: ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif (Creswell, 2008: 46).⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan sejalan dengan Creswell (2009: 266); Gay (2006: 413-423)⁵, yaitu membatasi penelitian dengan mengumpulkan informasi melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam dan mencatat informasi.

4. Hasil penelitian

1. Proses dan Model Rekrutmen

Proses rekrutmen yang dilakukan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan yaitu wakil Ketua DPD Partai Golongan Karya menyatakan bahwa: “ Dalam penjarangan rekrutmen bakal calon anggota legislatif partai Golongan Karya yaitu sesuai dengan AD/ART, Juklak dan Juknis serta Peraturan Organisasi, bahwa untuk rekrutmen bakal calon anggota legislatif DPD Partai Golongan Karya dilakukan penilaian aspek pendidikan, organisasi, pengalaman, pemahaman terhadap Undang-Undang terkait dan pengetahuan

² Kencana, 2002: 132

³ Ramlan Surbakti (2010: 150 – 151).

⁴ Creswell, (2008: 46)

⁵ Gay (2006: 413-423)

yang relevan kemudian melalui pembobotan skor aspek-aspek Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT).

Penjaringan rekrutmen bakal calon anggota legislatif di partai Golongan Karya diawali dengan sosialisasi Juklak dan Juknis tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus bakal calon, pendaftaran dengan syarat administrative lengkap, penerima berkas bakal calon oleh panitia (Bawaslu), verifikasi, penentuan nominasi daerah pemilihan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ditarik makna bahwa secara mekanisme dan prosedural rekrutmen calon anggota legislatif dilaksanakan sejalan dengan kebijakan partai, tetapi dalam hal pemberian skor aspek prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas terhadap partai secara internal masih kuat dipengaruhi hal-hal yang bersifat subjektif, sehingga hasilnya tidak jarang menimbulkan konflik internal berupa kecemburuan politik dalam hal penempatan nomor urut. Dimensi ini seringkali memicu frustrasi kader partai dan menyebrang ke partai politik lain, begitu pula dalam pemenuhan kuota 30% perempuan yang tampak tidak secara utuh diprioritaskan untuk kader partai perempuan tetapi diisi oleh perempuan yang muncul dadakan dari aktivis perempuan bukan kader yang loyalitasnya bergeser menjadi kemampuan finansial, sehingga model rekrutmen pun menjadi bervariasi antara terbuka dan tertutup yang sarat dengan kepentingan bahkan nepotisme.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung proses rekrutmen calon anggota legislatif di DPD partai Golkar Kabupaten Bandung: (1) Partai Golongan Karya adalah partai politik besar yang telah bejaya sejak pemerintahan Orde Baru; (2).Memiliki elit politik partai dengan fatsun politik yang mengakar; (3) Infrastruktur yang stabil

sampai tingkat pengurus kecamatan bahkan tingkat rukun warga; (4) Eksistensi partai Golongan Karya memberikan kesan positif bagi kalangan generasi tua yang mengalami masa orde baru; (4). Pengalaman politik praktis yang kuat; (5) Elit politik bisa dianggap masih dominan menduduki jabatan politis sebagai Kepala Daerah; (6) Sarana infra struktur partai cukup memadai; dan (7) Kepemimpinan politik partai diisi kader politik internal yang memiliki fanatisme partai.

Faktor penghambat dalam proses rekrutman calon anggota legislatif di DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung adalah : (1) Masih terjadi konflik internal terutama antara generasi tua dan generasi milenial;(2)Tim seleksi masih terkesan subjektif;(3) Kaderisasi yang dibangun kadang terganggu dengan aspek kepentingan;(3) Penetapan nomor urut sarat dengan kepentingan politis dan kekeluargaan; (4) Money politik dalam rekrutmen masih terkesan kental ;(5) Intervensi DPP untuk nomor urut masih terjadi; (6) Kaderisasi melalui pendidikan politik kader belum terealisasi yang beralasan pendanaan;(7) Tingkat frustrasi kader dan memutuskan keluar dari partai;(8) Masih dihadapkan kesulitan untuk pemenuhan kader perempuan dengan kuota 30%; (9) Penolakan untuk mendapat nomor urut besar.

Upaya yang dilakukan Oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bandung :(1) Membangun komitmen yang membuka kader untuk maju sebagai calon legislatif;(2) menugaskan kader-kader unggulan di tiap daerah pemilihan untuk dijadikan motor utama penggerak di masyarakat. 3). Merealisaikan secara nyata program kerja yang telah dibuat. 4). Memperkuat infrastruktur partai salah satunya dengan mengembangkan dan pengelolaan sumber daya keuangan agar ada alokasi dana.

5. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:

1. Rekrutmen Calon Anggota Legislatif untuk DPRD Kabupaten Bandung pada Pemilu 2014 sesuai dengan model rekrutmen politik Seligman dan Jacob, diawali dengan sosialisasi pendaftaran, Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran diri para calon anggota legislatif.

2. Tim Seleksi Calon Anggota Legislatif masih belum netral, karena personilnya termasuk orang-orang yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, sehingga penilaian dan penetapan kurang objektif.

4. Terdapat temuan berupa penilaian normatif mengenai Prestasi Dedikasi Disiplin Loyalitas dan Tidak Tercela masih belum objektif dan sarat dengan kepentingan politik yang mempengaruhi penilaian Ketua dan Tim Seleksi sehingga mewarnai model rekrutmen.

Saran-saran

1. Untuk mendapatkan calon anggota legislatif yang sesuai dengan harapan dan kriteria partai, maka proses seleksi harus bersifat objektif sehingga menumbuhkan kesadaran kader bahwa partai Golongan Karya adalah partai politik besar yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

2. Sikap diskriminasi Tim Seleksi terhadap calon anggota legislatif harus dihilangkan, sehingga membuka peluang sama dan adil untuk semua kader partai dan Tim Seleksi seharusnya orang-orang yang terdiri dari pengurus yang tidak/belum mencalonkan diri sebagai bagian dari pemilu pada periode tersebut.

3. Pada saat menentukan nomor urut calon anggota legislatif sebaiknya tidak langsung diputuskan oleh Ketua DPD Partai Golkar tetapi diputuskan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam (2000). *Pengantar Ilmu Politik* Jakarta Gramedia
- Cholisin, dkk. (2007). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Creswell. John. W. 2008. *Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Reserach, Second Edition*. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall
- Creswell, John W. (2009). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penerjemah Achmad Fawaid.
- Syafei, kencana, inu . (2002). *Sistem Politik Indonesia*, Bandung : Refika
- Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice In Europe and Americ*. Waltham, Mass. Blaisdell Publishing Company, 1967.
- Faisal. Sanafiah (1999). *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Dasar Dan Aplikasi* Malang: YA3
- Gaffar, Afaatara, Sahid. (2007). *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Gay, L. R. G. E. Mills (2006) *Education Reasearch (Competencies for Analysis and Applications)* USA. Pearson.
- Koirudin .2004. *Partai Politik Dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Norris, Pippa (ed). 1997. *Passage to Power : Legislative Recruitment in Advanced Democracies*. Cambridge : Cambridge University Press.
- Jurnal POLITIKA, Vol. 4, No. 2, Oktober 2013.

